

## **INDEPENDENSI MAJELIS ARBITER DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

### **INTISARI**

Penulis: Eko Dwi Prasetyo<sup>1</sup>.

Pembimbing: Dr. Sutanto, S.H., M.S.<sup>2</sup>.

---

Penelitian mengenai independensi majelis arbiter dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui independensi majelis arbiter BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui prosedur arbitrase serta efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase BPSK.

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan norma-norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa prosedur penunjukan arbiter di BPSK, dimana konsumen hanya dapat menunjuk arbiter dari unsur konsumen dan pelaku usaha hanya dapat menunjuk arbiter dari unsur pelaku usaha mengindikasikan bahwa arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, seolah-olah menjadi wakil dari masing-masing pihak yang menunjuknya. Ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah, yang seharusnya mempunyai peranan penting dalam menengahi sengketa konsumen, tidak memiliki independensi sama sekali, karena sebelum mengambil suatu putusan mereka cenderung harus meminta nasihat atasannya terlebih dahulu. Di samping itu, Putusan arbitrase BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak serta tidak adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam putusan BPSK juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atas putusan BPSK dan membuat putusan BPSK menjadi tidak efektif.

**Kata Kunci: BPSK, Independensi BPSK, Putusan Arbitrase BPSK**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Jakarta, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

***THE INDEPENDENCE OF THE TRIBUNAL AND EFFECTIVITY  
IMPLEMENTATION OF THE ARBITRATION AWARD ON CONSUMER  
DISPUTE SETTLEMENT BOARD (BPSK)***

***ABSTRACT***

*Author: Eko Dwi Prasetyo<sup>3</sup>.*

*Adviser: Dr. Sutanto, S.H., M.S.<sup>4</sup>*

---

*Research on the independence of the tribunal and effectivity implementation of the arbitration award on Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) is a juridical empirical research that aims to determine the independence of the tribunal BPSK in resolving consumer disputes through arbitration procedures as well as the effective implementation of the BPSK arbitration award.*

*The study uses both primary and secondary data. Primary data are obtained from field research by means of interview, while secondary data are obtained from library research. These data are analyzed using a normative qualitative research method that starts from the data obtained were then analyzed qualitatively using the norms, principles and regulations that exist as a positive law.*

*From the analysis results are revealed that the procedure of the appointment of the arbitrator in BPSK, where the consumer can only appoint arbitrator from the consumers elements and businesses can only appoint arbitrator from the business elements, indicate that the arbitrator appointed by each party, as if a representative of each party who appointed him. Chairman of the assembly that comes from the government, which should have an important role in mediating consumer disputes, has no independence at all, because before taking a award they are likely to have to ask the advice from his superiors first. In addition, the BPSK arbitral award is final and binding can still be made remedies that can be done by the parties and the absence of irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", in the BPSK arbitration award also raises legal uncertainty over BPSK arbitration award and make the BPSK arbitral award be ineffective.*

***Key Words: BPSK, independence of BPSK, BPSK Arbitration Awards***

---

<sup>3</sup> Student of Faculty of Law Gadjah Mada University.

<sup>4</sup> Dosen Faculty of Law Gadjah Mada University.